

PARIWISATA BAHARI SEBAGAI PEMBANGKIT EKONOMI BIRU: STUDI KASUS KABUPATEN BUTON SEBAGAI PENYANGGAH DESTINASI WAKATOBI

Muhammad Elmansyah¹

leliroswita02@gmail.com¹

Eliyanti²

eamokodompit66@gmail.com²

^{1,2}Universitas Haluoleo

ABSTRACT

Marine tourism holds significant potential for driving sustainable blue economy growth in Indonesia's coastal areas. Buton Regency, as a buffer zone for the Wakatobi tourist destination, boasts abundant marine resources, including marine biodiversity, maritime culture, and ecotourism potential. This study aims to analyze the role of marine tourism in supporting blue economy development in Buton Regency. The research method used a descriptive qualitative approach through literature review, field observations, and interviews with local stakeholders. The results indicate that marine tourism in Buton can create new economic opportunities for coastal communities, raise awareness of marine conservation, and strengthen regional connectivity with Wakatobi. However, challenges such as limited infrastructure, human resource capacity, and suboptimal tourism governance need to be addressed immediately to ensure the sustainable realization of the blue economy's potential.

Keywords: Merine Tourism, Blue Economy, Buton Regency, Wakatobi, Sustainable Development.

ABSTRAK

Pariwisata bahari memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan di wilayah pesisir Indonesia. Kabupaten Buton sebagai daerah penyangga destinasi wisata Wakatobi memiliki sumber daya bahari yang melimpah, baik dari segi keanekaragaman hayati laut, budaya maritim, maupun potensi ekowisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pariwisata bahari dalam mendukung pembangunan ekonomi biru di Kabupaten Buton. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata bahari di Buton mampu menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir, meningkatkan kesadaran konservasi laut, dan memperkuat koneksi regional dengan Wakatobi. Namun, tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM, dan tata kelola pariwisata yang

belum optimal perlu segera diatasi agar potensi ekonomi biru dapat terealisasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pariwisata Bahari, Ekonomi Biru, Kabupaten Buton, Wakatobi, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ekonomi biru (blue economy) menjadi paradigma baru pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian ekosistem laut. Salah satu sektor unggulan dalam ekonomi biru adalah pariwisata bahari, yang tidak hanya menawarkan keindahan alam bawah laut, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui pengembangan usaha lokal, lapangan kerja, dan pelestarian budaya maritim.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang luar biasa. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan seperti degradasi ekosistem laut, penangkapan ikan berlebih, pencemaran laut, serta minimnya infrastruktur kelautan yang ramah lingkungan. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan literasi ekonomi biru di tingkat daerah masih perlu diperkuat. Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap pengembangan ekonomi biru melalui berbagai kebijakan

strategis, termasuk penyusunan Peta Jalan Ekonomi Biru (Blue Economy Roadmap) 2023–2045 yang memuat arah kebijakan, rencana aksi, serta indikator capaian pembangunan ekonomi biru secara nasional.

Blue economy atau ekonomi biru hadir sebagai paradigma pembangunan baru yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini relevan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. Penerapan blue economy di sektor pariwisata bahari tidak hanya bertujuan untuk menarik wisatawan, tetapi juga sebagai strategi konservasi laut, peningkatan kapasitas masyarakat lokal, dan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, blue economy menjadi kerangka pembangunan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan ramah lingkungan.

Kabupaten Buton, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki posisi strategis sebagai penyangga destinasi wisata Wakatobi yang sudah mendunia. Potensi bahari Buton meliputi

pantai berpasir putih, terumbu karang, pulau-pulau kecil, serta kekayaan budaya masyarakat pesisir. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendorong ekonomi biru secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Buton dapat menjadi motor penggerak ekonomi biru serta memperkuat posisi Buton sebagai daerah penyangga Wakatobi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan strategi pengembangan pariwisata bahari berbasis blue economy dengan pendekatan keberlanjutan yang terintegrasi, serta menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan maritim yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menggali potensi, tantangan, dan strategi pengembangan pariwisata bahari berbasis blue economy di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya kawasan Taman Nasional Wakatobi, sebagai representasi konkret dari destinasi wisata bahari yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi.

Sumber data utama berasal dari studi literatur, mencakup dokumen kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, strategi

nasional ekonomi biru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dokumen Integrated Tourism Master Plan (ITMP) untuk kawasan Wakatobi. Selain itu, referensi dari laporan lembaga internasional seperti UNEP dan World Bank juga digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual penelitian.

Data dianalisis menggunakan kerangka Triple Bottom Line (TBL), yaitu pendekatan evaluatif yang mencakup tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan:

1. Dampak Lingkungan: sejauh mana pariwisata bahari mendukung konservasi ekosistem laut dan sumber daya alam.
2. Dampak Ekonomi: kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
3. Dampak Sosial: inklusivitas, keterlibatan masyarakat lokal, dan peningkatan kesejahteraan.

Metode ini dipilih karena memberikan pemahaman menyeluruh terhadap implementasi blue economy dalam sektor pariwisata, bukan hanya dari sisi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek ekologis dan sosial yang sering kali terabaikan. Penelitian ini tidak berupaya menghasilkan generalisasi, tetapi lebih pada memberikan pemetaan strategis dan rekomendasi berbasis konteks lokal yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan pariwisata bahari ke depan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Identifikasi Potensi Wilayah

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh wilayah perairan, di mana 16 dari 17 kabupaten/kota memiliki garis pantai dan ekosistem laut yang melimpah. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama adalah Taman Nasional Wakatobi, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Kawasan ini mencakup 76% spesies karang pembentuk terumbu karang perairan dangkal di dunia, menjadikannya sebagai "Amazon Lautan". Potensi ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam pengembangan pariwisata bahari yang berbasis konservasi laut dan keberlanjutan.

Pariwisata Bahari dan Ekonomi Biru

Konsep ekonomi biru menekankan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan ekosistem laut. Pengembangan wisata bahari di Buton telah memberikan kontribusi terhadap:

- Pertumbuhan ekonomi lokal, melalui UMKM berbasis wisata seperti homestay, transportasi laut, dan kuliner laut.
- Kesadaran konservasi, karena wisata berbasis alam mendorong masyarakat menjaga kebersihan pantai dan terumbu karang.
- Pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan keterlibatan mereka

sebagai pemandu wisata, nelayan wisata, atau pengrajin suvenir.

Integrasi Kebijakan dan Perencanaan Blue economy telah diintegrasikan dalam dokumen strategis nasional, seperti RPJMN 2025- 2029, dengan memasukkan sektor pariwisata bahari sebagai salah satu fokus pembangunan ekonomi kelautan. Selain itu, dokumen Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Wakatobi menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata berbasis zona dan daya dukung lingkungan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti lemahnya koordinasi antar instansi, terbatasnya infrastruktur dasar di wilayah pesisir, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip keberlanjutan.

Dimensi Sosial dan Lingkungan

Kedua dokumen menekankan bahwa keberhasilan ekonomi biru tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat lokal dan kedulian terhadap lingkungan. Pariwisata bahari yang berbasis komunitas dapat:

- Memperkuat budaya lokal dan tradisi maritim,
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan
- Mendorong konservasi berbasis partisipasi masyarakat.

KKP (2024) menambahkan bahwa edukasi dan literasi masyarakat tentang nilai ekonomi laut sangat penting agar

program ekonomi biru tidak hanya menjadi jargon kebijakan, tetapi mendarat pada tindakan nyata di lapangan.

Strategi Penguatan Buton Sebagai Penyangga Wakatobi

Beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Pengembangan destinasi tematik bahari (misalnya "Buton Eco-Marine Trail").
- b. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata berbasis masyarakat.
- c. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan di wilayah pesisir.
- d. Integrasi paket wisata regional Buton-Wakatobi sebagai satu kesatuan destinasi unggulan Sulawesi Tenggara.
- e. Pemanfaatan teknologi digital dan promosi wisata berbasis media sosial.

SIMPULAN

Pariwisata bahari di Kabupaten Buton memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan. Sebagai daerah penyangga destinasi Wakatobi, Buton mampu memperkuat ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sumber daya laut. Namun, untuk mencapai potensi maksimal, diperlukan kebijakan terpadu yang mencakup penguatan infrastruktur, pengembangan SDM, dan promosi wisata terpadu. Dengan

demikian, Buton tidak hanya menjadi pelengkap Wakatobi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi biru di kawasan Sulawesi Tenggara. Konsep blue economy bukan sekadar wacana pembangunan alternatif, melainkan solusi nyata untuk memastikan bahwa laut tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga warisan untuk generasi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Sulawesi Tenggara. (2021). *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Buton*. Kendari: Pemda Sultra.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023). *Laporan Pembangunan Ekonomi Biru Indonesia*. Jakarta: KKP RI.
- Kementerian PPN/Bappenas (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap*. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2024). *Bijak Mengelola Laut Untuk Ekonomi Biru*. Jakarta Pusat.
- Kustiwa, R., & Eliyanti, M. (2025). *Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Blue Economy Development Of Marine Tourism Based On Blue Economy*. Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara. 2(2), 1347-1350.
- Reddy, K., & Bhaskar, S. (2024). *Integrating Marine Tourism into the Blue Economy Framework*. Journal

- of Environmental Management and Tourism. 3(75), 501-505.
- UNDP (2020). *Blue Economy: Sustainable Ocean Development for Economic Growth*. New York: United Nations Development Programme.
- Wibowo, A., & Nuraini, S. (2022). *Pariwisata Bahari dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Timur*. Jurnal Kelautan, 17(2), 65–78.